

ANALISIS MANFAAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Abul A'la Alrahim
Politeknik Keuangan Negara STAN
abulnr50@gmail.com¹

Puji Wibowo
Politeknik Keuangan Negara STAN
Puji.wibowo@pknstan.ac.id²

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
1 September 2022

Tanggal Revisi:
18 September 2022

Tanggal Diterima:
10 Oktober 2022

Publikasi On line:
10 Nopember 2022

Abstract

This study aims to determine the use of information generated from the accrual-based local government reports of Bantaeng Regency by its users. The analytical method used is a qualitative method. Data collection through interviews, questionnaires and document review. Then for the analysis of data from interviews and document review using an interactive model of analysis, while the questionnaire data were analyzed using descriptive statistics. The results of the study show that users use accrual-based information on Local Government Financial Statements in the process of making decisions. The Utilization of each financial report for different decision-making, namely: first, the balance sheet is useful for decision making in the procurement of resources for the next period as well as the management of assets and liabilities of local governments; The second LRA is useful in making decisions to assess the level of budget absorption and evaluation of materials for the next period; the three LO is useful in decision making in assisting the budgeting process, understanding government policies and strategic plans; lastly, CaLK is useful in decision making in helping to explain the calculation of accounts on the face of the financial sheet in order to reduce risk for reports in decision making.

Key Words: Accrual-Based Regional Government Financial Statements, Decision Making

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang berbasis akrual oleh penggunanya. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner dan penelaahan dokumen. Kemudian untuk analisis data dari hasil wawancara dan penelaahan dokumen menggunakan analisis model interaktif, sedangkan untuk data kuesioner dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis akrual dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pemanfaatan dari masing-masing laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang berbeda-beda, yaitu: pertama Neraca bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam pengadaan sumber daya untuk periode berikutnya serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah daerah; kedua LRA bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk menilai tingkat penyerapan anggaran dan bahan evaluasi kinerja untuk periode berikutnya; ketiga LO bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam membantu proses penyusunan anggaran, memahami kebijakan dan rencana strategis pemerintah; yang terakhir CaLK bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam membantu menjelaskan perhitungan akun-akun pada bagian muka lembar laporan keuangan agar dapat mengurangi risiko kesalahpahaman bagi pembaca dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Pengambilan Keputusan

PENDAHULUAN

Setiap Kementerian/Lembaga/OPD diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran pendapatan dan belanja yang telah disusun dan/atau dianggarkan. Bagi pemerintah daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan APBD. Mengacu pada UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pejabat pengelola keuangan daerah memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD (Indonesia, 2003) Laporan keuangan yang disusun harus benar-benar mencerminkan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku (Indonesia, 2003, 2010). Hal ini dimaksudkan agar output yang dihasilkan dapat lebih baik dan berkualitas dalam mendukung manfaat dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, yakni antara lain relevan, andal serta dapat dipahami. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah di Indonesia beberapa kali dilakukan reformasi dalam hal basis akuntansi yang digunakan, mulai dari basis kas (cash basis), basis kas menuju akrual (cash towards accruals), dan basis akrual (*full accruals*). Singkatnya, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya (Salia & Wibowo, 2022). Manfaat dari basis akrual antara lain meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penerapan basis akrual yang sesuai dengan SAP diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi aspek transparansi dan prinsip akuntabilitas. Dalam UU 17 tahun 2003, SAP basis akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Indonesia, 2003). Basis akrual yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tentunya sangat berdampak terhadap informasi yang dihasilkan, memungkinkan akan lebih berkualitas karena akan menyajikan informasi yang sebenarnya (Hakim & Wibowo, 2019). Hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 bahwa basis akrual yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan manfaat bagi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan sebagai pemangku kepentingan, dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan (Indonesia, 2010). Yang mana sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu prinsip efisiensi bahwasanya biaya yang telah dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Trihani (2018) menyatakan bahwa basis akrual memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan basis akuntansi lainnya, karena basis akrual menyajikan informasi yang lebih transparan bagi pemerintah daerah dalam hal pengeluaran biaya pemerintah dan kualitas dalam pengambilan keputusan, selain memberikan manfaat bagi pemerintah daerah juga memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dari pengelolaan sumber daya suatu entitas dan juga untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya pemerintah suatu daerah.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan inkonsistensi mengenai manfaat penerapan basis akrual dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Andhayani (2017) menyatakan bahwa penerapan SAP basis akrual dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengambilan keputusan dinilai kurang efektif, dikarenakan kendala kompetensi sumber daya manusia yang belum terpenuhi dan juga akan menimbulkan potensi konflik dan korupsi. Dalam penelitian lainnya, Putra & Mulyani (2019) melakukan penelitian yang serupa mengenai manfaat informasi dari laporan keuangan yang menyatakan bahwa pemanfaatan informasi dari laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Yang menjadi perhatian penulis ialah penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Operasional (LO) bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam hal melakukan evaluasi mengenai operasional pemerintah, tetapi hal tersebut masih terdapat persepsi yang mengatakan bahwa laporan operasional yang dibuat hanya sebagai pemenuhan dari ketentuan basis akrual yang digunakan. Namun, penelitian lain mengatakan bahwa "Secara parsial penerapan SAP berbasis akrual itu akan berpengaruh signifikan terhadap informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan internal (Lestari & Dewi, 2020). Argumen tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Salam & Sutaryo (2019) menyatakan bahwa pelaporan keuangan dengan basis akrual dianggap memenuhi dan sesuai dalam hal penyediaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan internal di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten kecil yang memiliki kurang dari 100 desa, telah menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sejak tahun 2015, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan data dari BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari LKPD Pemerintah Kabupaten Bantaeng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Bantaeng, tentunya tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga memperoleh penghargaan dari Kepala KanWil DJPb Provinsi Sulawesi-Selatan sebagai terbaik kedua dalam penyaluran anggaran dana desa secara cepat dalam kinerja pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 se-Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemaparan di atas, riset ini bertujuan untuk menganalisis penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan dan pemanfaatan informasi akrual laporan keuangan dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan sangat erat kaitannya dengan hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak yang di mana salah satu pihak sebagai principal melakukan kesepakatan suatu kontrak dengan pihak lain yang disebut agent baik secara implisit ataupun eksplisit dengan harapan bahwa pihak lain (agent) dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh principal (Abdullah & Halim, 2006). Menurut Luayyi (2010) mengatakan bahwa teori keagenan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama pemilik modal dan manajer perusahaan dalam mengelola aktivitas suatu perusahaan, peran manajer sangat penting karena manajer merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sebagai manajer dengan tanggungjawab yang sangat besar tentunya dalam menjalankan amanah yang diberikan tidak menutup kemungkinan manajer melakukan suatu tindakan yang semata-mata hanya menguntungkan dirinya sendiri yang disebut manajemen laba (*earnings management*). Apabila dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan di pemerintah daerah, maka teori keagenan ini merupakan salah satu alat ukur untuk menilai bagaimana suatu pemerintah daerah mengelola kinerjanya. Dalam proses pengambilan keputusan di suatu daerah tentunya melibatkan berbagai pihak kepentingan yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik kepentingan. Konflik yang terjadi bisa saja diakibatkan melalui penyediaan informasi yang asimetris dikarenakan salah satu pihak mengutamakan kepentingannya sendiri (Syah Putra & Mulyani, 2019).

Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness Theory*)

Lestari & Dewi (2020) mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan paradigma teori kegunaan keputusan (*Decision Usefulness Theory*) adalah Chambers. Pendekatan teori ini mengenai syarat dari kualitas laporan keuangan, syarat di mana yang dimaksud ialah kualitas dari laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pengguna informasi keuangan. Teori ini tercermin dalam bentuk aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Komponen yang dimaksud adalah mengenai syarat dari penentuan kualitas dari laporan keuangan yaitu relevan, and, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Menurut Rahmawati et al., (2018) teori kegunaan keputusan berisi komponen-komponen yang menjadi pertimbangan bagi para penyaji informasi keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Miloud (2014, dikutip dalam Zain et al., (2021) mengemukakan bahwa stakeholder theory pada prinsipnya berdasar pada pandangan bahwa selain pemegang saham, terdapat beberapa pihak lain yang tertarik dengan kinerja dan pengambilan keputusan perusahaan, Stakeholder adalah individu ataupun kelompok yang diuntungkan atau dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa, keberadaan suatu perusahaan tergantung pada pemangku kepentingan yang mana setiap kegiatan perusahaan diiringi dengan dukungan dan pengakuan dari para stakeholder. Menurut Nugroho et al., (2020) *stakeholder theory* adalah suatu hubungan antara beberapa pihak yang membentuk satu kesatuan yang memiliki kepentingan yang mana hubungan tersebut merupakan bagaimana pemodal, pemasok, karyawan, pelanggan, dan manajer membentuk satu perkumpulan dan berinteraksi sehingga menciptakan dan memperdagangkan nilai.

Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah & Fauzi (2008) akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan yang telah dihasilkan dengan melalui aktivitas pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah suatu rangkaian prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan juga operasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam melakukan prosedur pelaporan posisi keuangan tentunya berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi pemerintahan merupakan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang disajikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL merupakan basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam laporan keuangan ketika suatu transaksi telah terjadi tanpa memperhatikan kas masuk ataupun keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa, penerapan basis akruaL diharapkan mampu menyajikan informasi yang lebih bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dan juga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas atas posisi keuangan. Selain itu dalam penelitian Zelmianti (2015) akuntansi akruaL merupakan basis akuntansi yang mana transaksi ekonomi maupun peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat peristiwa tersebut terjadi, tanpa memerhatikan kapan pendapatan diterima ataupun beban dibayarkan. Dalam pencatatan basis akruaL menganggap bahwa ketika adanya pencatatan transaksi atau terjadinya suatu peristiwa ekonomi maka transaksi tersebut harus segera diakui karena instansi/badan telah memiliki hak dan kewajiban atas hal itu.

Menurut Hery (2016), laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang mencerminkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjadi dasar hubungan komunikasi data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Panggabean (2019), laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk informasi keuangan yang di dalamnya berisi data dari berbagai bentuk pembiayaan, belanja, dan investasi dari aktivitas pemerintah yang selanjutnya akan disajikan ke dalam laporan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas dana masyarakat yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memiliki pondasi pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari berbagai bentuk kecurangan, sehingga akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan secara keseluruhan menurut Hery (2016) adalah semata-mata untuk memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti investor untuk pengambilan keputusan investasi dan kreditor dalam pengambilan keputusan kredit. Laporan keuangan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di suatu daerah serta pengguna informasi akuntansi harus betul-betul memahami mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dikarenakan beragamnya keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan serta metode dan kemampuan mereka dalam memproses informasi tersebut. Menurut Susanto (2015, dikutip dalam) Syah Putra & Mulyani (2019) menyatakan bahwa dari sisi bidang pemerintahan, pelaporan keuangan memiliki tujuan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan kinerja pemerintah, dan juga dalam pengambilan keputusan dari segala bidang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat tujuh komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib disajikan antara lain: 1) Neraca; 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 6) Laporan Arus Kas (LAK); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah dalam Pengambilan keputusan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Indonesia, 2010). Menurut Liando & Elim (2016) mengatakan bahwa LRA memberikan peran yang sangat penting dalam pemerintah daerah, yang memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Adapun manfaat dari LRA adalah untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, sehingga menghasilkan surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang nantinya antara realisasi dan anggarannya akan dibandingkan yang berguna untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di periode

selanjutnya serta berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima. Selanjutnya, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset (aset lancar atau tidak lancar), kewajiban (kewajiban lancar atau tidak lancar), dan ekuitas pemegang saham. Menurut Kawatu (2019) neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan tentang posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Menurut Suhartanto (2013, dikutip dalam Syah Putra & Mulyani, 2019)) mengatakan bahwa informasi yang disajikan di neraca dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan instrumen aset dan kewajiban pemerintah dan juga untuk menilai likuiditas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Arus Kas menggambarkan saldo awal dan saldo akhir kas untuk aktivitas operasi, investasi dan transitoris pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Menurut Hery (2016), laporan arus kas bermanfaat untuk melakukan evaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung, dan juga merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa depan. Komponen laporan keuangan yang bersifat suplemen namun esensial adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan ini membantu menjelaskan secara naratif item tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan yang meliputi: 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan maupun akuntansi; 2) Informasi kebijakan fiskal dan ekonomi makro; 3) Ringkasan pencapaian target keuangan dan juga kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan; 4) Informasi mengenai dasar penyusunan pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya; 5) Menjelaskan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum dijelaskan pada lembar muka laporan; 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Menurut Suhartono (2013, dikutip dalam, Syah Putra & Mulyani, 2019) mengatakan bahwa catatan atas laporan keuangan memiliki kontribusi yang signifikan sebagai pelengkap dari komponen laporan keuangan lainnya yang dimaksudkan supaya informasi yang disajikan dapat mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan mempunyai nilai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, untuk akun pendapatan dan beban menggunakan basis akrual dalam hal pengakuannya. Menurut Syah Putra & Mulyani (2019), laporan operasional bermanfaat dalam melakukan evaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, mengevaluasi keefektifan dan keefisienan kinerja pemerintah, dan juga bermanfaat dalam memprediksi pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan operasional pemerintah. Menurut Syah Putra & Mulyani (2019) laporan perubahan ekuitas bermanfaat dalam mengevaluasi perubahan kebijakan yang berpengaruh pada bertambah atau berkurangnya ekuitas atau modal. Kemudian, untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih, koreksi kesalahan pembukuan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran setiap periode akuntansi.

Penelitian Terdahulu

Andhayani (2017) mengatakan bahwa penerapan SAP basis akrual dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengambilan keputusan dinilai kurang efektif, dikarenakan kendala kompetensi sumber daya manusia yang belum terpenuhi dan juga akan menimbulkan potensi konflik dan korupsi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa bendahara pengeluaran berperan sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan yang merasakan perubahan akrual sebagai suatu komitmen. Komitmen yang dimaksud yaitu agar seluruh pihak-pihak yang berkontribusi langsung dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadikan basis akrual sebagai wacana saja tetapi segera melakukan penyesuaian akuntansi dan berharap mempercepat dibuatnya kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta informasi yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Syah Putra & Mulyani (2019) melakukan penelitian yang serupa dan berpendapat bahwa pemanfaatan informasi dari laporan keuangan dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Masing-masing laporan keuangan pemerintah daerah memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan, yang menjadi perhatian penulis ialah penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Operasional (LO) bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam hal melakukan evaluasi mengenai operasional pemerintah, tetapi hal tersebut masih terdapat persepsi yang mengatakan bahwa laporan operasional yang dibuat hanya sebagai pemenuhan dari ketentuan basis akrual yang digunakan sehingga pemanfaatan laporan operasional belum optimal. Adapun akun-akun yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusannya adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan alasan jenis akun

tersebut dipandang lebih menggambarkan capaian tujuan kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode anggaran yang dilaporkan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi(2020) mengatakan bahwa "Secara parsial penerapan SAP berbasis akruaL itu akan berpengaruh signifikan terhadap informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan internal sebesar 54,4%". Dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk pengambilan keputusan internal setiap OPD. Senada dengan penelitian di atas, menurut Salam & Sutaryo (2019) pelaporan keuangan dengan basis akruaL dianggap memenuhi dan sesuai dalam hal penyediaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan internal di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Jawa Timur. Dalam menghasilkan manfaat dari laporan keuangan yang berbasis akruaL tentunya didukung oleh SDM yang memiliki latar belakang dibidang akuntansi selain itu juga didukung oleh SDM yang memiliki attitude yang baik guna mencegah terjadinya kecurangan dan kelalaian dalam laporan keuangan, mencegah penyalahgunaan aset serta memastikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu valid/benar. Trihani(2018)menjelaskan bahwa penerapan basis akruaL dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan menghasilkan manfaat yang lebih dibandingkan dengan basis kas menuju akruaL dalam hal pengambilan keputusan internal pemerintah daerah di Kota Solok, dan akan menghasilkan pengambilan keputusan yang berbeda antara basis akruaL dengan basis kas menuju akruaL. Karno (2017) berpendapat bahwa pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menganggap bahwa informasi berbasis akruaL lebih memiliki manfaat dalam berbagai situasi pengambilan keputusan internal. Selain itu, juga terjadi perbedaan tingkat kegunaan informasi akuntansi berbasis akruaL dan basis kas yang menunjukkan informasi basis kas lebih berguna. Faktor internal dan eksternal juga memengaruhi informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, untuk faktor internal berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan baik basis kas maupun akruaL. Sedangkan untuk faktor eksternal, hanya memengaruhi akuntansi berbasis kas tetapi tidak untuk basis akruaL. Selaras dengan penelitian di atas, Fatmawati & Setiawan (2018) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis akruaL akan menghasilkan pengendalian internal yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga informasi dalam laporan keuangan lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Supraja (2019) menjelaskan hubungan antara implementasi SAP berbasis akruaL dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAP berbasis akruaL mendukung kinerja pemerintah daerah agar lebih terstruktur dan dapat dibandingkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Setiawan & Gayatri (2017) berpendapat bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam menyajikan informasi laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga lebih berguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dengan pengendalian intern dan motivasi kerja yang baik juga akan mendukung kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus di Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Menurut Yusuf (2017) mengatakan bahwa penelitian studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara detail tentang suatu kejadian, latar sosial, orang ataupun kelompok dengan menggunakan beberapa metode serta sumber informasi yang berguna untuk memahami bagaimana suatu kejadian ataupun peristiwa itu terjadi dan apakah telah berfungsi sesuai dengan konteksnya. Adapun metode yang digunakan adalah metode studi kasus deskriptif, yang menjelaskan manfaat dari komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Menurut Slevitch (2011, dikutip dalam Zaluchu, 2020) penelitian kualitatif umumnya menggunakan data yang sifatnya analisis deskriptif seperti melakukan wawancara, menghasilkan laporan hasil pengamatan dan catatan pengamatan. Adapun tahap analisis dalam pendekatan ini telah dimulai sejak awal dilakukannya penelitian dan pengambilan data, dengan bersumber dari teori-teori yang ada sehingga menghasilkan laporan dan menjadi uraian analisis. Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh seorang penulis/peneliti. Data primer yang penulis peroleh berasal dari informan melalui proses wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari Sekretariat Daerah yaitu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah bagian akuntansi dan keuangan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemilihan keempat OPD tersebut dengan alasan karena, anggaran pendapatan dan belanjanya paling besar diantara OPD lain yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya untuk data sekunder adalah jenis data yang tidak diperoleh dari objek penelitian secara langsung melainkan diperoleh dari sumber yang telah

tersedia. Data sekunder yang telah penulis kumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari badan pengelola keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Selain melalui proses wawancara, penulis juga memperoleh data dengan membagikan kuesioner via online menggunakan g-form dengan formchecklist. Kuesioner yang penulis buat ditujukan kepada pihak-pihak pengelola keuangan yang berkontribusi terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan sebagai pengambil keputusan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Data-data yang telah dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan pembagian kuesioner, maka selanjutnya data tersebut akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk uji validitas menggunakan validitas isi (*content validity*) dan melakukan triangulasi data. Validitas isi yang menekankan bahwa keabsahan instrumen yang disusun dihubungkan dengan ruang lingkup yang ingin diukur atau ditanyakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan sumber yang sama, oleh karena itu penulis melakukan triangulasi untuk membuat kesimpulan dari beberapa sumber yang telah dikumpulkan. Triangulasi data dilakukan dengan dua cara, yang pertama hasil wawancara dari satu informan dilakukan konfirmasi dengan jawaban informan lainnya, dan yang kedua hasil wawancara akan dilakukan pencocokan dengan jawaban kuesioner. Kemudian untuk uji reliabilitasnya dilakukan dengan cara stabilitas dan konsistensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Manfaat Basis Akrua! dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantaeng sendiri telah menggunakan basis akrua! sejak tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hasil wawancara yang telah dilakukan, informan yang berasal dari OPD dinas PUPR Ibu Fardiana mengatakan bahwa dengan diterapkannya basis akrua! di pemerintah Kabupaten Bantaeng ini sangat memberikan kemudahan dalam penyajian laporan keuangan OPD sehingga akurasi data yang disajikan dapat lebih akurat. Selain itu menurut Ibu Sri Wahyuni yang berasal dari dinas pendidikan dan kebudayaan menjelaskan bahwa diawal penerapan basis akrua! ini tidaklah mudah karena diperlukannya adaptasi yang cepat dengan perubahan yang terjadi sehingga memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami perubahan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dan tuntutan penyajian laporan keuangan, maka setiap OPD yang ada di Kabupaten Bantaeng secara kolektif dan terpadu beradaptasi terhadap perubahan yang ada karena dapat mempermudah setiap OPD dalam melakukan penatausahaan laporan keuangan yang lebih baik.

Akun yang Menjadi Dasar Dalam Pengambilan Keputusan

Hasil wawancara dari beberapa informan mengatakan bahwa pada pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menjadikan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, yaitu akun pendapatan, beban maupun belanja dalam melakukan evaluasi capaian output yang telah ditetapkan pada periode anggaran. Hal tersebut didukung dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Syah Putra & Mulyani (2019) menjelaskan bahwa akun yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan alasan bahwa jenis akun tersebut lebih menggambarkan target kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode anggaran yang dilaporkan.

Manfaat Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah digunakan dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara oleh Ibu Anugrahwati selaku kepala bidang bagian akuntansi BPKD diketahui bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, kepala badan BPKD, kepala bidang bagian keuangan, dan kepala bidang bagian akuntansi telah memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, tidak hanya pada LKPD tetapi juga pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, juga telah digunakan saat review oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAP dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut selaras dengan *single person decision theory* yang mana dalam pengambilan keputusan yang rasional, maka

pemanfaatan komponen laporan keuangan pemerintah daerah dapat membantu memahami sesuatu yang akan berguna. Hasil penelitian yang penulis lakukan juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Syah Putra & Mulyani (2019) mengatakan bahwa setiap komponen pada laporan keuangan pemerintah daerah memiliki manfaat masing-masing dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

Manfaat Neraca dalam Pengambilan Keputusan

Hasil analisis data kuesioner dari jawaban responden menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan di neraca membantu dalam melakukan klasifikasi dan menilai aset dan kewajiban pemerintah daerah sebesar 79,49% (P5), sebanyak 71,79% membantu dalam memahami potensi realisasi dan posisi keuangan pemerintah daerah (P11) dan sebanyak 69,23% membantu dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah (P2). Sedangkan dalam melakukan evaluasi keputusan alokasi sumber daya pada periode pelaporan (P7), hanya sebanyak 23,08% responden menyatakan informasi dalam neraca bermanfaat, sebanyak 20,51% untuk membantu dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima (P1) dan dalam memahami kebijakan dan rencana strategis pemerintah (P12) hanya sebanyak 17,95%. Hasil penelitian dari data kuesioner kemudian dilakukan konfirmasi dengan hasil penelitian melalui wawancara, informan pertama berasal dari OPD BPKD Ibu Anugrahwati mengatakan bahwa neraca bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan aset dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah. Informan lainnya yang berasal dari dinas PUPR Ibu Fardiana mengatakan bahwa neraca dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk periode berikutnya karena informasi dalam neraca dapat menjelaskan setiap pergerakan atau realisasi dan memberikan informasi nilai aset dan kewajiban yang dituangkan ke dalam redaksi penjelasan alur kas yang diperoleh atau yang telah direalisasikan masing-masing OPD. Ibu Rosmawati yang berasal dari dinas Kesehatan sebagai salah satu informan juga berpendapat yang sama bahwa neraca dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yaitu neraca dapat menjadi acuan dalam melihat kinerja sumber daya yang terjadi selama periode anggaran dan sebagai bahan evaluasi untuk periode berikutnya. Diperkuat dengan pendapat Ibu Sri Wahyuni berasal dari dinas pendidikan dan kebudayaan bahwa neraca sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian aset, kewajiban maupun ekuitas sehingga mampu melakukan evaluasi terkait pengalokasian sumber daya untuk periode berikutnya. Beberapa hasil wawancara yang telah didapatkan dari para informan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa neraca telah digunakan dalam pengambilan keputusan, neraca merupakan dasar pengklasifikasian aset dan kewajiban dan evaluasi atas kinerja sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 01 bahwa neraca memiliki manfaat dalam menilai klasifikasi atas aset dan kewajiban, untuk menyajikan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kinerja atas sumber daya yang dimiliki. Dalam PSAP 01 juga dijelaskan bahwa neraca menyediakan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan periode berikutnya serta untuk keperluan jangka panjang. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian Kawatu (2019) bahwa neraca menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas.

Tabel 1. Hasil kuesioner untuk manfaat neraca

Neraca	Frekuensi		Total	Persentase
	Dimanfaatkan	Tidak Dimanfaatkan		
P1	8	31	39	20,51%
P2	27	12	39	69,23%
P3	12	27	39	30,77%
P4	19	20	39	48,72%
P5	31	8	39	79,49%
P6	12	27	39	30,77%
P7	9	30	39	23,08%
P8	13	26	39	33,33%
P9	21	18	39	53,85%
P10	13	26	39	33,33%

P11	28	11	39	71,79%
P12	7	32	39	17,95%
P13	10	29	39	25,64%
P14	22	17	39	56,41%
P15	22	17	39	56,41%
P16	25	14	39	64,10%
P17	22	17	39	56,41%

Sumber: hasil pengolahan data oleh penulis

Manfaat LRA dalam Pengambilan Keputusan

Hasil analisis data dari jawaban kuesioner mengenai manfaat LRA dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng menunjukkan sebanyak 94,87% LRA bermanfaat dalam menilai tingkat penyerapan anggaran pada periode berjalan (P17) dan sebagai bahan evaluasi untuk periode berikutnya dalam penyusunan anggaran (P3) sebanyak 89,74%. LRA juga bermanfaat dalam membantu memahami potensi realisasi dan posisi keuangan pemerintah (P11) sebanyak 87,18%. Responden lainnya hanya sebanyak 23,08% beranggapan bahwa neraca bermanfaat dalam melakukan dan menilai klasifikasi aset dan kewajiban pemerintah. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAP 01 bahwa dalam melakukan dan menilai klasifikasi aset dan kewajiban itu disediakan oleh neraca bukan LRA. Sementara hanya sebanyak 48,72% responden yang memilih LRA bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima.

Tabel 2 Hasil kuesioner manfaat LRA

LRA	Frekuensi		Total	Persentase
	Dimanfaatkan	Tidak Dimanfaatkan		
P1	19	20	39	48,72%
P2	30	9	39	76,92%
P3	35	4	39	89,74%
P4	32	7	39	82,05%
P5	9	30	39	23,08%
P6	28	11	39	71,79%
P7	29	10	39	74,36%
P8	28	11	39	71,79%
P9	28	11	39	71,79%
P10	31	8	39	79,49%
P11	34	5	39	87,18%
P12	22	17	39	56,41%
P13	24	15	39	61,54%
P14	29	10	39	74,36%
P15	30	9	39	76,92%
P16	26	13	39	66,67%
P17	37	2	39	94,87%

Sumber: hasil pengolahan data oleh penulis

Hasil penelitian wawancara juga menghasilkan hasil yang sama, menurut informan Ibu Anugrahwati dari OPD BPKD menjelaskan bahwa LRA sebagai alat penyedia informasi untuk pengambilan keputusan dalam hal penilaian kinerja keuangan daerah. Jawaban dari Informan yang berasal dari dinas pendidikan dan kebudayaan Ibu Sri Wahyuni mengatakan hal yang sama bahwa LRA menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta dapat digunakan untuk keputusan sumber daya ekonomi yang nantinya akan

digunakan dalam membiayai program-program yang ada. Diperkuat dengan jawaban dari dinas PUPR Ibu Fardiana dan dari dinas kesehatan Ibu Rosmawati yang berpendapat hampir sama bahwa LRA berguna dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai dasar target anggaran tahun berikutnya dan untuk mendanai belanja ataupun setiap kegiatan yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi anggaran berikutnya. Oleh karena itu, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu LRA di pemerintah Kabupaten Bantaeng telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat sebagai media dalam mengambil keputusan target anggaran untuk periode akuntansi berikutnya dan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan alokasi belanja kegiatan yang efektif untuk dilaksanakan. Sesuai dengan PSAP 02 menjelaskan bahwa LRA bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam menyediakan informasi sumber daya ekonomi, dan dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut LRA sebagai dasar dalam melihat realisasi anggaran pada tahun berjalan serta juga bermanfaat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk periode berikutnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando & Elim (2016) bahwa LRA menyediakan informasi yang sangat bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan daerah. Argumen tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Diah Agustijanti (2018, dikutip dalam Syah Putra & Mulyani, 2019) berpendapat bahwa LRA bermanfaat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD untuk periode berikutnya.

Manfaat LRA dalam Pengambilan Keputusan

Hasil analisis data kuesioner menunjukkan bahwa LO bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Responden sebanyak 61,54% LO bermanfaat dalam membantu proses penyusunan anggaran (P3), dan memahami kebijakan dan rencana strategis pemerintah di Kabupaten Bantaeng (P12). Sebanyak 58,97% LO bermanfaat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah terkait efisiensi, efektivitas dan keekonomisan perolehan (P8), berguna dalam melakukan prediksi mengenai pendapatan yang akan diterima dan besarnya pengeluaran (Beban) yang akan ditanggung pemerintah (P10). Sedangkan sebanyak 12,83% LO bermanfaat dalam membantu dalam pengadaan kebutuhan sumber daya pada periode berikutnya dan kebutuhan jangka Panjang. Dan hanya sebanyak 7,69% responden yang menjawab bahwa LO bermanfaat dalam memahami asumsi ekonomi makro dalam penganggaran dan realisasinya. Jawaban responden tersebut dikonfirmasi dengan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan para informan.

Tabel 3 Hasil kuesioner manfaat LO

Penjelasan	Frekuensi		Total	Persentase
	Dimanfaatkan	Tidak Dimanfaatkan		
P1	22	17	39	56,41%
P2	11	28	39	28,21%
P3	24	15	39	61,54%
P4	5	34	39	12,82%
P5	12	27	39	30,77%
P6	6	33	39	15,38%
P7	4	35	39	10,26%
P8	23	16	39	58,97%
P9	9	30	39	23,08%
P10	23	16	39	58,97%
P11	8	31	39	20,51%
P12	24	15	39	61,54%
P13	22	17	39	56,41%
P14	3	36	39	7,69%
P15	7	32	39	17,95%
P16	14	25	39	35,90%

P17	6	33	39	15,38%
-----	---	----	----	--------

Sumber: hasil pengolahan data oleh penulis

Informan pertama yang berasal dari dinas PUPR Ibu Ferdiana mengatakan bahwa LO bermanfaat untuk melihat target pendapatan dan realisasi pendapatan yang telah diperoleh pada masing-masing OPD, sehingga LO dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Informan kedua Ibu Rosmawati dari dinas kesehatan mengatakan hal yang serupa bahwa LO bermanfaat dalam melihat kinerja suatu OPD sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi kinerja sumber daya untuk periode anggaran berikutnya. Informan ketiga dari dinas pendidikan dan kebudayaan Ibu Sri Wahyuni mengatakan LO menyediakan informasi potensi-potensi pendapatan daerah serta beban-beban yang harus ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran berjalan sehingga dapat menjadi dasar untuk kinerja tahun berikutnya. Diperjelas dengan Informan dari BPKD Ibu Anugrahwati bahwa berpendapat bahwa LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa LO dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam hal perolehan sumber daya ekonomi untuk periode mendatang. Hasil dari data-data yang telah dikumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa LO memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng, yaitu dapat menjadi alat dalam menilai kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai cerminan untuk melakukan alokasi pendapatan dan beban untuk periode akuntansi berikutnya. Hal tersebut telah sesuai yang ada dalam PSAP 12 tentang laporan operasional bahwa informasi yang disajikan dalam LO berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima dan beban yang harus ditanggung. Selain itu, LO juga bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas serta keekonomiisan perolehan sumber daya ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Umar (2018) menjelaskan bahwa LO bermanfaat dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima guna mendanai program kegiatan pemerintah dalam periode mendatang. Sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syah Putra & Mulyani(2019) bahwa LO bermanfaat sebagai pertimbangan dalam melakukan prediksi atas pengeluaran yang akan dilakukan di periode mendatang dan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan keuangan pemerintah daerah, tetapi pemanfaatan LO belum optimal dengan anggapan bahwa LO dibuat hanya untuk memenuhi ketentuan penggunaan basis akrual.

Manfaat CaLK dalam Pengambilan Keputusan

Tabel 4 Hasil kuesioner manfaat CaLK

Penjelasan	Frekuensi		Total	Persentase
	Dimanfaatkan	Tidak Dimanfaatkan		
P1	18	21	39	46,15%
P2	13	26	39	33,33%
P3	12	27	39	30,77%
P4	8	31	39	20,51%
P5	12	27	39	30,77%
P6	25	14	39	64,10%
P7	25	14	39	64,10%
P8	14	25	39	35,90%
P9	21	18	39	53,85%
P10	15	24	39	38,46%
P11	7	32	39	17,95%
P12	13	26	39	33,33%
P13	15	24	39	38,46%
P14	10	29	39	25,64%
P15	7	32	39	17,95%

P16	13	26	39	33,33%
P17	22	17	39	56,41%

Sumber: hasil pengolahan data oleh penulis

Hasil analisis data dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden menunjukkan bahwa CaLK bermanfaat dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng. Jawaban responden menghasilkan sebanyak 64,10% CaLK berguna dalam pengambilan keputusan sumber daya (P6), melakukan evaluasi keputusan alokasi sumber daya pada periode pelaporan (P7). Sebanyak 56,41% CaLK dapat bermanfaat dalam menilai tingkat penyerapan anggaran. Sedangkan hanya sebanyak 17,65% CaLK bermanfaat dalam memahami potensi realisasi dan posisi keuangan pemerintah (P11), menilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran. Hasil wawancara dengan para informan kemudian dilakukan konfirmasi dengan jawaban kuesioner. Tanggapan Ibu Anugrahwati selaku informan dari BPKD mengatakan bahwa informasi yang disajikan dalam CaLK bermanfaat dalam membantu menjelaskan perhitungan akun-akun yang ada di lembar muka laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan pada pemerintah daerah. Selanjutnya Ibu Fardiana dari dinas PUPR berpendapat yang sama bahwa CaLK sangat berperan penting dalam laporan keuangan karena sebagai pelengkap dan penjelas dari angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga mampu mengurangi risiko kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan pemerintah daerah. Diperjelas oleh Ibu Sri Wahyuni dari dinas pendidikan dan kebudayaan dan Ibu Rosmawati dari dinas kesehatan mengatakan bahwa sudah sangat jelas CaLK memiliki peran yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan yaitu dapat membantu dan memperkuat prediksi alokasi sumber daya untuk periode anggaran berikutnya. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang telah didapatkan bahwa CaLK yang dihasilkan di Kabupaten Bantaeng telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah yaitu sebagai media dukung dalam memprediksi alokasi sumber daya karena memberikan informasi penjelas agar dapat dipahami oleh pembaca laporan keuangan, sehingga bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan atas sumber daya yang digunakan. Sesuai yang tercantum dalam PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan yang mana CaLK akan memberikan kemudahan bagi para pengguna secara luas dalam memahami laporan keuangan yang disajikan, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satar & Rachman (2020) bahwa CaLK bermanfaat dalam menilai capaian kinerja ataupun keputusan sumber daya instansi dengan melihat program-program yang telah tercapai dan program-program yang masih harus dimaksimalkan untuk periode berikutnya. Manfaat pengungkapan laporan keuangan terhadap proses evaluasi kinerja pemerintah dapat dijumpai juga pada penelitian Nogueira et al., (2013) dan Nogueira & Jorge (2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis manfaat laporan keuangan berbasis akruaI dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait manfaat laporan keuangan berbasis akruaI dalam pengambilan keputusan antara lain: Pertama; Penerapan basis akruaI ini telah memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng telah digunakan dalam pengambilan keputusan. Kedua; Neraca telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng. Neraca dimanfaatkan dalam pengadaan sumber daya untuk tahun berikutnya, melakukan klasifikasi dan menilai aset dan kewajiban pemerintah daerah serta membantu memahami potensi realisasi dan posisi keuangan pemerintah daerah; Ketiga; Selanjutnya untu LRA juga telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng. LRA berguna untuk menilai tingkat penyerapan anggaran dan bahan evaluasi untuk periode berikutnya seperti sebagai dasar target anggaran tahun berikutnya dan untuk mendanai belanja untuk program-program yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng; Keempat; Kemudian untuk LO juga telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng. LO berguna dalam membantu proses penyusunan anggaran, memahami kebijakan dan rencana strategis pemerintah daerah, dan bermanfaat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah terkait efektivitas dan keekonomisan perolehan; dan kelima; untuk CaLK juga telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Bantaeng. CaLK berguna dalam menentukan keputusan alokasi sumber daya

pada periode berjalan, informasi yang disajikan dalam CaLK membantu menjelaskan perhitungan akun-akun pada bagian lembar muka laporan keuangan agar dapat mengurangi risiko kesalahpahaman bagi pembaca sehingga menghasilkan nilai komprehensif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut beberapa saran yang ditujukan kepada dua pihak, antara lain: Pertama, pemerintah Kabupaten Bantaeng hendaknya melakukan pengawasan yang lebih baik lagi secara berkala terhadap OPD yang masih belum memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan internal sebagaimana mestinya, dan melakukan sosialisasi terhadap OPD yang masih belum maksimal dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan terhadap pentingnya penyajian laporan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi agar dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan internal OPD. Kedua, kepada peneliti berikutnya diharapkan menggunakan lebih banyak informan terutama kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan tidak hanya pada sub bagian keuangan saja, dan juga menggunakan responden yang lebih luas lagi tidak hanya satu orang untuk setiap OPD agar data yang didapatkan lebih akurat, serta diharapkan lebih banyak menggunakan referensi-referensi yang relevan sebagai bahan literatur mengenai manfaat laporan keuangan dalam pengambilan keputusan terkhusus untuk pengambilan keputusan dipemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://www.researchgate.net/publication/273257684>
- Andhayani, A. (2017). Dilema Akrualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 48, 291–307. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7055>
- Fatmawati, R., & Setiawan, D. (2018). Dampak Pengendalian Intern dan Ketepatan Informasi Terhadap Kebermanfaatan Akuntansi Akrua! Studi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 137–150. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10900>
- Hakim, M. L. N., & Wibowo, P. (2019). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi pada BLU Kesehatan. *Balance Vocation Accounting Journal, December 2021*, 140–153. https://www.researchgate.net/profile/Puji_Wibowo/publication/357794976_Analisis_Determinan_Kualitas_Laporan_K_euangan_Dengan_Kompetensi_SDM_Sebagai_Variabel_Moderasi_pada_BLU_Kesehatan/links/61dffacd323a2268f9a0d9f0/Analisis-Determinan-Kualitas-Laporan-Keu
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2008). *Akuntansi Pemerintahan* (1st ed.). In Media.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Karno, P. (2017). Kegunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 73–91. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i4.39>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1473–1484.
- Luayyi, S. (2010). Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–216. <https://doi.org/10.18860/em.v1i2.1871>
- Nogueira, S. P. S., & Jorge, S. M. F. (2016). Explanatory factors for the use of the financial report in decision-making: Evidence from Local Government in Portugal. *Revista de Contabilidade-Spanish Accounting Review*, 19(2), 216–226. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.09.002>
- Nogueira, S. P. S., Jorge, S. M. F., & Oliver, M. C. (2013). The usefulness of financial reporting for internal decision-making in Portuguese municipalities. *Management Research*, 11(2), 178–212. <https://doi.org/10.1108/MRJIAM-Dec-2011-0465>
- Nugroho, D., Ardiawan, D. F., & Putra, A. D. (2020). Fenomena Badut Sedih : Sebuah Kajian Stakeholder Theory. *Jurnal Industri Dan Perkotaan*, 16(January).
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151.

<https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>

- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 8–17.
- Salam, A., & Sutaryo, S. (2019). Kesesuaian Sistem Pelaporan Keuangan Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal di Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4087>
- Salia, F. N., & Wibowo, P. (2022). Ada Apa dengan Faktor Kepemimpinan dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidean Surakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 8(1), 63–88.
- Satar, M., & Rachman, Y. A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) Dan Penggunaan Laporan Keuangan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol.11(2012), hlm 80-92.
- Setiawan, I. W. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 671–700.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(01), 115–130. <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>
- Syah Putra, D. S., & Mulyani, S. (2019). Manfaat Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.205>
- Trihani, I. (2018). Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Akuntansi Sektor Publik*, 1, 1–20.
- Umar, M. D. (2018). Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis2*, 6(6), 22–32.
- Zain, R. N. W., Hendriyani, C., Nugroho, D., & Ruslan, B. (2021). Implementation of CSR Activities from Stakeholder Theory Perspective in Wika Mengajar. *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1), 102–107. <https://doi.org/10.31334/abiwarra.v3i1.1846>
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Sektor Pemerintah Di Indonesia. *JRAK*, 6(1), 68–72.